Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mengalami perubahan yang amat besar yaitu proses reformasi ekonomi dan demokratisasi dalam bidang politik. Pada tahun 2000, Pemerintah Indonesia menandatangani "Deklarasi Millenium" yang berisi komitmen untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan. Hal ini menjadi dasar dari tersusunnya pencapaian tingkat kesejahteraan umat manusia pada seribu tahun yang akan datang. Komitmen tersebut diterjemahkan menjadi beberapa tujuan dan target yang dikenal sebagai *Millennium Development Goals* (MDGs).

Millenium Development Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium adalah upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama antara 189 negara anggota PBB untuk melaksanakan 8 (delapan) tujuan pembangunan, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, kelestarian lingkungan hidup, serta membangun kemitraan global dalam pembangunan.

Pengurangan angka kemiskinan menjadi tujuan utama dari MDGs ini. Hal ini terlihat dari poin pertama komponen besar MDGs yang semuanya ditargetkan padatahun 2015. Pencapaian sasaran MDGs menjadi salah satu prioritas utama bangsa Indonesia khususnya pada pemerintahan SBY. Sepanjang satu dekade terakhir, tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin secara nasional terus menurun. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat seperti Jamkesmas, Program Keluarga Harapan, Beras Untuk keluarga Miskin (Raskin) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan hak-hak dasar mereka.

Gambar 1.1

Tingkat Kemiskinan di Indonesia

	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)	Perubahan Angka Kemiskinan (persentase)
Maret '12 – Maret '13	-1.06	-0.58
Sept '12 – Sept '13	-0.05	-0.19

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin & Tingkat Kemiskinan Per 2013

Namun demikian, untuk mencapai target pemerintahan SBY – Boediono sebesar 8-10% pada akhir tahun 2014 bukanlah pekerjaan mudah.

Untuk penajaman sasaran dalam rangka ketepatan sasaran program penaggulangan kemiskinan, pada akhir tahun 2013 pemerintah meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang merupakan penanda Rumah Tangga Miskin, yang digunakan untuk mendapatkan manfaat program Jamkesmas, Program Keluarga Harapan, Beras Untuk keluarga Miskin (Raskin) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) . Kartu ini diberikan kepada 15.530.897 Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang merupakan 25% Rumah Tangga dengan status ekonomi terendah di Indonesia.

Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa dengan memiliki satu KPS mereka dapat memperoleh berbagai manfaat program penanggulangan kemiskinan tersebut. Kebanyakan masyarakat hanya mengetahui fungsi Kartu Perlindungan Sosial (KPS) ini untuk memperoleh program Jamkesmas. Sebagai contoh, sebagian besar masyarakat tidak tahu bahwa Bantuan Siswa Miskin (BSM) dapat diperoleh melalui Kartu Perlindungan sosial, *take up rate* program BSM melalui mekanisme KPS ini hanya sekitar 5%.

Dalam hal ini diperlukan sosialisasi mengenai program BSM ini untuk meningkatkan *take up rate* Program BSM melalui mekanisme KPS. Berdasarkan hasil basis data terpadu, setelah diadakan sosialisasi BSM Tahap I, terjadi peningkatan *take up rate* dari 5% (saat sosialisasi mulai dilakukan) menjadi 25% (saat sosialisasi selesai). Sosialisasi BSMTahap II,

berkontribusi terhadap peningkatan take up rate dari 25% menjadi 41%. Sosialisasi ini dilakukan oleh divisi komunikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Peranan *Public Relations* sangat dibutuhkan oleh hampir semua bentuk organisasi atau lembaga, bersifat komersial maupun tidak komersial, dari perusahaan/industri, organisasi profesi, institusi pendidikan, organisasi sosial budaya sampai pemerintahan.

Keberadaan *Public Relations* di sebuah instansi milik pemerintah merupakan suatu keharusan secara fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan atau mempublikasikan tentang suatu kegiatan atau aktifitas instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk hubungan masyarakat ke dalam, maupun kepada masyarakat luar. (Ruslan, 2007:339)

Dalam pemerintahan, humas atau *Public Relations* sering disebut sebagai "sekretaris pers", "information officer", "public affair specialist" atau "communications specialist", bertugas menginformasikan pada publik mengenai aktivitas yang dilakukan pemerintah. Humas juga berurusan dengan publisitas institusi, serta berurusan dengan semua aspek pekerjaan. Humas akan menghubungi orang-orang, merencanakan dan melakukan penelitian dan menyiapkan material untuk distribusi. Humas juga mengurus pekerjaan *advertising* atau promosi untuk mendukung kegiatan sosialisasi program maupun kebijakan pemerintah. (Sari, 2007:22)

PR berperan untuk mempublikasikan kebijakan, memberikan informasi mengenai hasil kerja lembaga pemerintahan dan memberi pengertian kepada masyarakat mengenai kebijakan dan peraturan yang dibuat.

Rosady Ruslan (2007:340) dalam bukunya berjudul "*Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi :Konsepsi dan Aplikasi"* menjelaskan beberapa fungsi pokok dari *PR* pemerintah, sebagai berikut:

1. Mengamankan kebijakan pemerintah, misalnya mensosialisasikan suatu kebijakan atau aturan baru agar diterima oleh masyarakat.
2. Menyampaikan informasi kepada publik mengenai kebijakan, aktivitas, maupun prestasi suatu instansi, khususnya melalui media massa.
3. Menjadi komunikator (juru bicara), sekaligus mediator yang proaktif menjembatani kepentingan pemerintah dan publiknya.
4. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun panjang.
5. Memelihara dan mempertahankan kontak antara organisasi dengan publik, termasuk mengatur speaking engangement, pidato, presentasi (slide, film, dan sebagainya), serta menyiapkan proposal dan laporan yang diperlukan.

Melihat kesuksesan yang dilakukan oleh peran PR lembaga negara

dalam menyosialisasikan beberapa program pemerintah, penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai peran PR dalam lembaga negara.

1.2 Tujuan Kerja Magang

Pengalaman dalam melaksanakan kerja magang dapat berguna dalam menghadapi dunia kerja. Melalui kerja magang mahasiswa diharapkan siap untuk menjalani berbagai tantangan dalam dunia kerja. Sekarang ini, tidaklah cukup hanya mendapatkan teori terkait dengan kegiatan *PR*, diperlukan praktek langsung bagi mahasiswa untuk mengetahui kegiatan *PR* dalam dunia nyata. Oleh karena itu magang bukan hanya persyaratan wajib yang merupakan syarat kelulusan Strata 1 di Universitas Multimedia Nusantara, tetapi terdapat manfaat lebih dalam menjalankan kerja magang. Berikut adalah tujuan dari kerja magang:

1. Menambah wawasan serta pengetahuan mengenai dunia kerja terkait dengan konsentrasi *Public Relations* dalam lembaga negara khususnya mengenai sosialiasi program penanggulangan kemisikinan.
2. Mendapat pengalaman kerja secara praktik pada bidang *Public Relations* dalam sebuah lembaga negara.
3. Melatih kedisiplinan, menambah tanggung jawab, dan menumbuhkan profesionalisme sebagai seorang praktisi *PR* terutama dalam lembaga negara yang menghadapi publik yang

sangat luas sehingga kelak akan lebih mudah beradptasi dengan dunia kerja.

1.3 Waktu dan Prosedur Kerja Magang

Kegiatan kerja magang dilaksanakan di Divisi Komunikasi Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang beralamat di Grand Kebon Sirih lantai 16, Jalan Kebon Sirih Raya No. 35, Jakarta Pusat. Kegiatan kerja magang dilakukan selama dua bulan yang terhitung pada 01 April 2014 hingga 03 Juni 2014. Waktu kerja magang adalah senin-jumat, pukul 09.00 – 17.00.

Prosedur pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti bimbingan magang sebelumnya dari pihak kampus (Universitas Multimedia Nusantara).
2. Mahasiswa mengisi Formulir kegiatan kerja magang, untuk mendapatkan Surat Pengantar Kerja Magang yang akan diajukan ke Sekretariat TNP2K.
3. Mahasiswa mengajukan *Curriculum Vitae* kepada Sekretariat TNP2K, untuk melakukan kerja magang selama dua bulan surat tanda pengajuan kerja magang dari kampus.
4. Setelah mendapat konfirmasi, dan telah melalui tes wawancara, lalu mendapat konfirmasi kembali bahwa penulis telah

diterima untuk melakukan kerja magang di Sekretariat TNP2K, mahasiswa diberikan surat pernyataan resmi bahwa sudah diterima dalam program kerja magang.

5. Melengkapi kartu kerja magang dan formulir kehadiran selama masa magang berlangsung yang ditantangani seriap harinya oleh pembimbing lapangan.
6. Setelah periode pelaksanaan magang selesai, mahasiswa berkoordinasi dengan dosen pembimbing magang.
7. Laporan hasil magang yang sudah diterima dan disetujui oleh dosen pembimbing magang selanjutnya akan dipresentasikan dalam sidang magang.